



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja – Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

Nomor : B-24015/PK.310/F.4.C/10/2023 24 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular Strategis dan *Zoonosis* (PHMS-Z) serta Penyakit Infeksi Baru (PIB)

Yth. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Wates (terlampir)

Sehubungan dengan adanya risiko munculnya kembali kasus Penyakit Hewan Menular/PHM yang bersifat sporadik dan endemik (PMK, Antraks, HPAI, LPAI, ASF, LSD, Leptospirosis, Parasit Darah) dan PHM lain yang menjadi ancaman penyakit baru di wilayah kerja Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates yang masih bebas (Rabies, PPR, HPAI H5N6/H5N8, dan lainnya) dan mulai bergantinya iklim setelah periode *El-Nino*, maka diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi terjangkitnya kasus dan penyebaran penyakit tersebut di wilayah kerja BBVET Wates.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi adanya risiko berulangnya kasus penyakit yang telah ada sebelumnya (Antraks, PMK, LSD, AI, ASF, parasit darah, dan lainnya), risiko penularan penyakit baru di wilayah bebas (Rabies, *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Peste des Petits Ruminants* (PPR), HPAI H5Nx Clade 2.3.4.4b) sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah pencegahan dan mitigasi pengendalian penyakit.
2. Mengidentifikasi tempat/titik agregasi atau berkumpulnya ternak (pasar hewan, tempat pemotongan ternak, dll), pelaku (pedagang/pengepul/pemotong ternak), dan rute/jalur perdagangan ternak.
3. Meningkatkan pemantauan kesehatan dan pengawasan lalu lintas keluar masuk serta biosekuriti pada tempat/titik agregasi ternak, terutama lalu lintas ke dan dari daerah kabupaten/kota/provinsi berisiko tinggi terkait pada point 2.
4. Meningkatkan cakupan vaksinasi dan re-vaksinasi PHMS-Z terutama PMK, LSD, Antraks, Rabies, AI, dan PHMS lainnya untuk memberikan kekebalan individu dan kekebalan kelompok ternak.
5. Untuk daerah endemik penyakit ANTRAKS perlu dilakukan langkah-langkah serius untuk mencegah terjadinya kasus berulang dengan:

- a. Meningkatkan *surveilans* aktif atau pasif berbasis laporan masyarakat di zona tertular dan zona terancam serta daerah yang memiliki kaitan epidemiologi dan lalu lintas ternak dari dan ke daerah yang pernah tertular dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - b. Melakukan vaksinasi ulang yang terjadwal dan vaksinasi baru pada hewan rentan yang belum divaksin. Saat ini tersedia *buffer stock* vaksin Antraks dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian di BBVET Wates yang dapat digunakan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi tersebut.
 - c. Meningkatkan edukasi ke Pemilik Ternak terkait bahaya Antraks dan mekanisme pelaporannya jika terjadi kasus kematian ternak diduga Antraks.
6. Untuk penyakit PMK dan LSD perlu tetap diwaspadai kemungkinan adanya peningkatan kasus pada ternak baru akibat kelahiran ataupun perpindahan ternak antar daerah yang mungkin belum tervaksinasi. Cakupan vaksinasi baru dan ulangan perlu dievaluasi dan ditingkatkan terutama bagi daerah yang realisasi vaksinasi masih rendah (dibawah 70% dari populasi).
 7. Untuk penyakit ASF perlu digalakkan dan ditingkatkan manajemen beternak babi yang mengutamakan biosekuriti yang ketat, kebersihan kandang, dan terjaminnya nutrisi yang cukup dan sehat untuk menjaga status kesehatan hewan.
 8. Untuk penyakit AI perlu diwaspadai adanya kasus kematian unggas (unggas air, unggas pekarangan ataupun unggas komersial) yang diikuti angka kesakitan (*morbiditas*) yang tinggi dengan gejala mirip HPAI yang diduga disebabkan infeksi virus H5N1 clade 2.3.4.4b. Untuk diagnosis adanya infeksi clade baru ini perlu investigasi lapangan dan konfirmasi laboratorium.
 9. Untuk penyakit RABIES, walaupun seluruh daerah di wilayah kerja BBVET Wates masih berstatus bebas tetapi hasil analisa risiko masuk dan terjangkitnya penyakit ini tergolong tinggi dikarenakan berbatasan dengan wilayah di provinsi yang masih endemis dan adanya lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang illegal masuk ke Jawa Tengah/Jawa Timur/Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kebutuhan tertentu (kuliner tradisional dan hewan kesayangan). Untuk mengantisipasi terjangkitnya kasus rabies, kewaspadaan yang tinggi sangat diperlukan untuk mencegah terjangkitnya rabies dengan meningkatkan pengamatan dan pemantauan kesehatan hewan rentan rabies, vaksinasi rabies, dan edukasi masyarakat.
 10. Untuk penyakit PPR sampai saat ini masih menunjukkan seropositif yang merupakan indikasi kemungkinan adanya paparan agen penyakit di lapangan. Sebagai antisipasi munculnya kasus yang berpotensi menyebabkan wabah PPR, deteksi dini perlu dilakukan dengan meningkatkan pengamatan penyakit pada hewan kambing dan domba serta melaporkan dengan cepat kejadian kasus diduga PPR sehingga dapat dilakukan investigasi dan konfirmasi laboratorium.
 11. Pengamatan dan pengobatan penyakit parasiter juga diperlukan karena sifat penyakit yang immunosupresif yang dapat mengurangi tingkat kekebalan hewan terhadap penyakit tertentu. Disamping itu, kemungkinan infeksi penyakit parasit darah perlu

diperhatikan karena pada kondisi, tingkat kejadian, dan strain agen parasit tertentu bisa menyebabkan kasus kematian pada hewan.

12. Melakukan koordinasi dengan BBVET Wates untuk penyidikan kasus dan pengambilan sampel untuk mengetahui/mengidentifikasi penyebab penyebab dan faktor-faktor risiko kemunculan, penularan, dan penyebaran penyakit.
13. Meningkatkan peran Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan sekaligus pengamatan sindrom tanda klinis penyakit, merespon setiap informasi/laporan dari peternak terhadap munculnya sindrom tanda klinis yang mengarah PHMS dan Penyakit Infeksi Baru (PIB), melaporkan kasus ke iSIKHNAS, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga kasus dapat tertangani dengan cepat dan tepat.
14. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat (pemilik ternak, pedagang, pemotong hewan, masyarakat umum) melalui kegiatan sosialisasi dan KIE secara berkelanjutan sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, kewaspadaan penyakit, dan risiko penularan baik pada hewan (PHMS) maupun yang berpotensi menular pada manusia (PHMS-Z).
15. Melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas batas terhadap PHMS-Z yang dapat menyebar antar wilayah melalui lalu lintas dan perdagangan ternak dan melakukan langkah-langkah antisipatif lain untuk mencegah masuk dan munculnya PHMS, PHMS-Z, dan PIB di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kersamanya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Veteriner Wates,



Drh. HENDRA WIBAWA, M.Si., Ph.D.
NIP 197511042003121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Direktur Kesehatan Hewan

Pegawai BBVet Wates tidak menerima gratifikasi dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Keluhan atas kinerja dan pelayanan kami, dapat dikirimkan via WA 08112955145.



Lampiran surat

Nomor : 24015/PK.310/F.4.C/10/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara
8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
9. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
10. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
13. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten
15. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
16. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri
17. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
18. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen
19. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
20. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
21. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang
22. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati
23. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Peternakan Kabupaten Kudus
24. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara
25. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
26. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Semarang
27. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
28. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang
29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan
30. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
31. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal
32. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes
33. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
34. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
35. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tegal
36. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
37. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga
38. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang
39. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo
40. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
41. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul
42. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
43. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
44. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan
45. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
46. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
47. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

48. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso
49. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
50. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
51. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang
52. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri
53. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
54. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
55. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
56. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
57. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
58. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
59. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
60. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
61. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
62. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan
63. Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan
64. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
65. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo
66. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang
67. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo
68. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo
69. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep
70. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek
71. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
72. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung
73. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
74. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri
75. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun
76. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang
77. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto
78. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
79. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
80. Kepala Dinas Pertanian Kota Batu
81. Kepala UPTD Balai Veteriner Provinsi Jawa Tengah di Boyolali
82. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur di Malang
83. Kepala UPTD Balai Perbibitan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan
84. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Provinsi Jawa Timur di Tuban
85. Kepala Balai Veteriner Semarang